

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam serta keberagaman budaya yang menjadi identitas bangsa sekaligus daya tarik pariwisata. Potensi ini tidak hanya berfungsi menjaga kelestarian budaya dan lingkungan, melainkan juga mampu membuka peluang pembangunan sekaligus pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata berbasis lokal. Keindahan alam, kerajinan khas, serta tradisi dan seni budaya yang diwariskan turun-temurun dapat menjadi modal strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata yang berkelanjutan.

Salah satu bentuk pariwisata berbasis lokal adalah desa wisata. Desa wisata didefinisikan sebagai desa yang mampu menampilkan keaslian potensi alam, sosial, maupun budaya sebagai daya tarik wisata (Santoso & Atmoko, 2019). Desa wisata tidak hanya menjadi sarana pelestarian budaya dan lingkungan, melainkan juga berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan berbasis usaha lokal (Zakaris & Supihardjo, 2014). Dengan demikian, desa wisata diposisikan sebagai pendekatan pembangunan desa yang menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan budaya melalui proses pemberdayaan yang mencakup keterlibatan aktif masyarakat lokal.

Desa wisata menjadi strategi pembangunan lokal yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pengelolaan dan juga pemanfaatan

potensi desa. Sehingga dalam hal ini pengembangan desa wisata selaras dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada proses peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat agar mampu mengelola potensi yang dimiliki. Pemberdayaan desa wisata tidak hanya dimaknai dalam manfaat ekonomi yang diterima masyarakat tetapi juga sebagai ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam berbagai tahapan pengelolaan desa wisata.

Pemberdayaan desa wisata menuntut partisipasi masyarakat secara aktif dalam tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil kegiatan desa wisata. Partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam pengembangan desa wisata. Partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai keterlibatan fisik, melainkan juga mencakup keterlibatan pemikiran, tenaga, modal, serta tanggung jawab bersama dalam pengelolaan desa wisata (Sumaryadi, 2010). Oleh karena itu, pemberdayaan desa wisata menekankan pada paradigma dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, sehingga hasil pengelolaan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh warga desa.

Menurut data dari Jejaring Desa Wisata (Jadesta), hingga 21 Oktober 2024 tercatat 6.026 desa wisata di seluruh Indonesia, terdiri dari 4.687 desa wisata rintisan, 992 berkembang, 314 maju, dan 33 mandiri. Pada tahun 2025, jumlah desa wisata meningkat menjadi 6.057. Pemerintah melalui Kemenparekraf menyatakan bahwa saat ini jumlah desa wisata di Indonesia lebih 6.000 desa. Pertumbuhan ini mengindikasikan bahwa desa wisata telah menjadi strategi mendorong ekonomi kreatif sekaligus pemerataan pembangunan.

Tabel 1. 1 Jumlah Desa Wisata di Indonesia (2024-2025)

Tahun	Jumlah Desa Wisata
2024	6.026
2025	6.057

Sumber: Jejaring Desa Wisata (Jadesta) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, data per Oktober 2024 dan Januari 2025.

<https://jadesta.kememparekraf.go.id>

Adapun di Jawa Tengah menurut data Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dari hasil pemetaan pada tahun 2024 mencatat 886 desa wisata di Jawa Tengah terdiri dari 681 desa wisata rintisan, 167 berkembang, dan 38 maju. Program pengembangan desa wisata masih dijalankan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2019 yang mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, kelembagaan desa wisata, pencaangan, penilaian, dan penetapan desa wisata, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan, forum komunikasi desa wisata dan ketentuan penutup. Peraturan tersebut menjadi dasar pengaturan untuk pencaangan dan pemberdayaan desa wisata di provinsi Jawa Tengah. Perkembangan ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi desa wisata sebagai sumber ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Tabel 1. 2 Jumlah Desa Wisata di Jawa Tengah (2024-2025)

Tahun	Jumlah Desa Wisata
2024	886
2025	890

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Disporapar Jateng), data pemetaan desa wisata tahun 2024–2025.

<https://disporapar.jatengprov.go.id>

Berdasarkan data jumlah desa wisata di Kabupaten Klaten, tercatat terdapat 39 desa wisata pada tahun 2024 dan jumlah tersebut tidak mengalami perubahan

hingga tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan desa wisata di Kabupaten Klaten cenderung stagnan dalam kurun waktu tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan desa wisata tidak hanya berorientasi pada penambahan jumlah desa wisata, tetapi juga pada kualitas pengelolaan dan keberhasilan pemberdayaan masyarakat di dalamnya. Dengan demikian, keberhasilan desa wisata tidak cukup diukur dari aspek kuantitas, melainkan juga dari sejauh mana masyarakat mampu berpartisipasi aktif, mengembangkan potensi lokal, serta mencapai kemandirian dalam pengelolaan desa wisata.

Tabel 1. 3 Jumlah Desa Wisata di Kabupaten Klaten (2024-2025)

Tahun	Jumlah Desa Wisata
2024	39
2025	39

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Klaten (Disparbudpora Klaten), data per 2024–2025.
<https://disparbud.klaten.go.id>

Desa Jarum merupakan salah satu desa wisata yang terletak di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, dan secara resmi ditetapkan sebagai Desa Wisata melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten Nomor 556/254 Tahun 2020 tentang Penetapan Desa Jarum sebagai Desa Wisata, yang ditetapkan di Klaten pada tanggal 22 September 2020. Penetapan ini tidak terlepas dari rekam jejak prestasi Desa Jarum yang sebelumnya berhasil meraih Juara 3 pada Gelar Desa Wisata Jawa Tengah tahun 2019 yang diselenggarakan di Semarang. Prestasi tersebut menjadi landasan kuat bagi pemerintah daerah untuk memberikan legitimasi hukum dalam pengembangan Desa Jarum sebagai destinasi wisata berbasis budaya serta memperkuat posisinya sebagai desa wisata unggulan di Jawa Tengah.

Desa Jarum memiliki keunikan pada budaya batik tulisnya yaitu pewarnaannya yang menggunakan bahan dasar alami. Bahan pewarna yang digunakan masyarakat untuk dijadikan pewarna batik alami seperti talas, indigo, mahoni, dan tumbuhan lainnya sekaligus sebagai pewarna alam yang memiliki nilai paling mahal. Adapun potensi lainnya yang dimiliki Desa Jarum seperti kerajinan kayu, batik kayu, kesenian gamelan dan cobek batu. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gunungkidul, DIY mendorong berkembangnya kerajinan cobek/layah dengan bahan baku batu yang diambil dari Gunung kidul.

Tabel 1. 4 Jumlah dan Jenis UKM di Desa Jarum

No	Jenis Usaha	Jumlah
1	Batik Kain	24
2	Homestay	14
3	Batik Kayu	7
4	Batu Layah	7
5	Kerajinan Kayu	7
6	Kerajinan Gamelan	1
7	Kerajinaan Wayang	1
Jumlah		51

Sumber: Hasil wawancara langsung penulis pada pengelola POKDARWIS, 2025

Dalam perkembangannya, Desa Wisata Jarum tidak hanya mengandalkan satu jenis potensi, tetapi juga melibatkan beragam usaha pendukung yang tumbuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa desa wisata di Desa Jarum beroperasi melalui keterlibatan masyarakat dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi. Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa aktivitas usaha masyarakat di Desa Wisata Jarum tidak hanya terpusat pada satu jenis usaha yaitu batik, melainkan juga pada beberapa jenis usaha dengan karakteristik yang berbeda. Keberagaman jenis usaha

ini menunjukkan adanya variasi bentuk keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pemberdayaan desa wisata sehingga membuka ruang kajian mengenai dinamika partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan desa wisata.

Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) dibentuk sebagai pengelola kegiatan maupun program dari pemerintah. Program diklat dibentuk oleh pokdarwis yang bertujuan memberikan suatu lapangan pekerjaan untuk masyarakat lingkungan sekitar. Namun sangat disayangkan bahwa masyarakat mengaku kurang mengerti mengenai konsep pengelolaan Desa Wisata (Anshori, 2019). Terbatasnya sumber daya manusia dalam pemasaran produk batik menjadi kendala masyarakat Desa Wisata Jarum. Terbatasnya pengetahuan mengenai pemasaran sangat berdampak pada penjualan produk batik di Desa Wisata Jarum. Walaupun sebenarnya pokdarwis sudah melakukan inovasi melalui sosial media seperti instagram dan facebook, akan tetapi hal itu masih kurang memberikan hasil yang optimal pada penjualan produk batik (Putri & Sabardila, 2023).

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji seperti apa proses pemberdayaan sekaligus menganalisis bagaimana tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan desa wisata. Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai tahapan pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Jarum Kabupaten Klaten. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian pemberdayaan masyarakat dalam konteks desa wisata. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola dan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pemberdayaan desa wisata.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana proses pemberdayaan desa wisata di Desa Wisata Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses pemberdayaan desa wisata di Desa Wisata Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini yakni:

1. Menganalisis proses pemberdayaan desa wisata di Desa Wisata Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.
2. Menganalisis tantangan dalam proses pemberdayaan desa wisata di Desa Wisata Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Pemerintahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam kajian tata kelola pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan desa wisata. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman teoritis mengenai bagaimana peran pemerintah desa, aktor lokal, dan

masyarakat dalam proses pembangunan berbasis partisipasi.

2. Pengembangan dan penguatan teori partisipasi masyarakat dan desa wisata. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan serta menguatkan teori-teori yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dan konsep desa wisata. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan untuk melihat kembali relevansi teori dalam konteks empiris di lapangan, khususnya terkait dinamika keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata.
3. Referensi bagi penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, referensi, serta bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji isu serupa, terutama dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa wisata. Dengan demikian, penelitian ini dapat membuka ruang bagi kajian lanjutan yang lebih mendalam dan komparatif di lokasi atau konteks yang berbeda.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Masyarakat desa wisata, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat Desa Wisata Jarum dalam upaya mengoptimalkan potensi desa melalui proses pemberdayaan yang berkelanjutan. Pemberdayaan desa wisata menuntut penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi lokal agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi desa. Temuan mengenai berbagai tantangan dalam proses pemberdayaan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan pemberdayaan

Desa Wisata Jarum ke depan.

2. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan, referensi, atau bahan pembandingan bagi peneliti lain yang mengkaji isu serupa, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan desa wisata dan berbagai tantangan yang dihadapinya..
3. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan ilmiah penulis, khususnya dalam memahami dan menganalisis berbagai tantangan dalam proses pemberdayaan Desa Wisata Jarum, serta memperdalam wawasan penulis dalam kajian ilmu pemerintahan.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti dalam membandingkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang serupa yang pernah diteliti, dengan tema yang hampir mirip. Di bagian ini, penulis berniat untuk menjelaskan orisinilitas penelitian yang penulis lakukan. Peneliti juga akan mencantumkan penelitian yang relevan, serta merangkumnya. Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang peneliti ambil.

Judul penelitian pertama adalah “Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata kampung”. Disusun oleh Rahmah & Raharjo (2024). Lokasi penelitian terletak di Desa Kalialang Lama Sukorejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan merupakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta melibatkan triangulasi sumber dari

partisipasi penelitian yaitu pengelola, pedagang ataupun masyarakat. Penelitian ini berfokus pada proses pemberdayaan masyarakat serta faktor keberhasilan pengembangan desa wisata kampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan berjalan melalui tiga tahap penyadaran, transformasi pengetahuan, dan peningkatan kemampuan intelektual, dengan faktor keberhasilan utama berupa partisipasi aktif masyarakat dan dukungan kelembagaan yang konsisten.

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada orientasi analisisnya. Penelitian Rahmah dan Raharjo (2024) melihat ketiga tahap sebagai proses yang berjalan positif dan berfokus pada faktor keberhasilan. Sementara penelitian ini secara khusus menganalisis tantangan yang ditemukan di setiap tahapan, termasuk ketimpangan jangkauan sosialisasi, nihilnya pendampingan, dan kemandirian yang belum merata di seluruh lapisan komunitas.

Judul penelitian kedua adalah "Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran". Disusun oleh Wahyuni (2018). Lokasi penelitian terletak di Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul, DIY. Metode penelitian yang digunakan merupakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi lapangan. Penelitian ini berfokus pada tiga strategi pemberdayaan yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan dalam pengembangan desa wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemajuan desa wisata belum menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal karena rendahnya partisipasi dalam pengelolaan wisata.

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada konteks waktu dan kedalaman

analisis tantangan. Penelitian Wahyuni (2018) mengkaji desa wisata yang sudah berhasil dan melihat strategi pemberdayaan dari sisi yang lebih positif. Sementara penelitian ini secara spesifik berfokus pada tantangan dalam setiap tahapan dan menganalisis mengapa partisipasi yang tidak merata itu terbentuk secara struktural sejak tahap kesadaran, bukan hanya sebagai fenomena yang perlu diatasi.

Judul penelitian ketiga adalah "Strategi Pokdarwis dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wisata Giyanti, Wonosobo)". Disusun oleh Sari & Pinasti (2023). Lokasi penelitian terletak di Dusun Giyanti, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Penelitian ini berfokus pada upaya dan strategi yang dilakukan Pokdarwis dalam memberdayakan masyarakat melalui desa wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pokdarwis menjalankan lima strategi pemberdayaan yaitu peningkatan partisipasi, peningkatan kesadaran dan pelatihan, manajemen diri, mobilisasi sumber daya, serta pengembangan jejaring.

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada unit analisis dan perspektifnya. Penelitian Sari dan Pinasti (2023) menempatkan Pokdarwis sebagai aktor utama yang dianalisis strateginya dan cenderung melihat pemberdayaan dari sisi keberhasilan strategi. Sementara penelitian ini secara kritis menganalisis keterbatasan jangkauan Pokdarwis terhadap pelaku usaha non-anggota sebagai salah satu tantangan struktural, menggunakan kerangka tahapan Sulistyani (2004).

Judul penelitian yang keempat yaitu "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Wisata di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah" Disusun oleh Santoso (2022). Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata di Kelurahan Kandri telah berjalan dengan baik, ditandai dengan hadirnya sarana-prasarana dan pengembangan sumber daya manusia. Namun, ditemukan kekurangan pada aspek pendanaan serta promosi, dan disarankan perlunya pelatihan pemanfaatan teknologi serta manajemen media sosial untuk mendukung promosi desa wisata.

Perbedaan dengan penelitian penulis yakni penelitian ini berlokasi di Kelurahan Kandri, Kota Semarang, dan menganalisis pelaksanaan program desa wisata secara umum. Penelitian penulis berbeda secara lokus (Desa Wisata Jarum, Kab. Klaten), dan lebih spesifik pada identifikasi tantangan dalam proses pemberdayaan berdasarkan kerangka teoritis Sulistyani (2004). Penelitian Santoso (2022) tidak menggunakan teori tahapan pemberdayaan sebagai pisau analisis, sehingga aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan kemandirian tidak dikaji secara terstruktur.

Judul penelitian kelima yaitu "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Koja Doi" disusun oleh Rahman (2021). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian meliputi pemerintah desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan masyarakat Desa Koja Doi, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Hasil

penelitian mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu tahap penyadaran, tahap transformasi kemampuan, dan tahap peningkatan kemampuan intelektual. Bentuk pemberdayaan mencakup penyuluhan sadar wisata, pelatihan pengelolaan desa wisata, pelatihan kependamuan, dan pelatihan kewirausahaan.

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu Penelitian Rahman (2021) membahas pelaksanaan dan hasil pemberdayaan masyarakat di Desa Koja Doi, NTT, yang merupakan desa wisata bahari. Penelitian tersebut mengkaji proses dan bentuk pemberdayaan secara positif, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada tantangan yang menghambat jalannya tiap tahapan pemberdayaan di Desa Wisata Jarum yang berbasis budaya batik. Konteks geografis, jenis wisata, dan fokus analisisnya pun berbeda secara signifikan.

Tabel 1. 5 Penelitian terdahulu

NO	PENULIS DAN TAHUN	JUDUL	TEORI	METODE	HASIL
1.	Rahmah & Raharjo (2024)	Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata kampung	Teori tahapan pemberdayaan oleh Sulistyani (2004)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan berjalan melalui tiga tahap penyadaran, transformasi pengetahuan, dan peningkatan kemampuan intelektual, dengan faktor keberhasilan utama berupa partisipasi aktif masyarakat dan dukungan kelembagaan yang konsisten
2.	Wahyuni (2018).	Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam	Teori tahapan pemberdayaan oleh Sulistyani	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemajuan desa wisata belum menjamin

NO	PENULIS DAN TAHUN	JUDUL	TEORI	METODE	HASIL
		Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran	(2004)		peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal karena rendahnya partisipasi dalam pengelolaan wisata.
3.	Sari & Pinasti (2023)	"Strategi Pokdarwis dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wisata Giyanti, Wonosobo)"	Teori pemberdayaan berbasis komunitas	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pokdarwis menjalankan lima strategi pemberdayaan yaitu peningkatan partisipasi, peningkatan kesadaran dan pelatihan, manajemen diri, mobilisasi sumber daya, serta pengembangan jejaring.
4.	Santoso (2022)	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Wisata di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah	Teori tahapan pemberdayaan oleh Sulistyani (2004)	Metode kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata di Kelurahan Kandri telah berjalan dengan baik, ditandai dengan hadirnya sarana-prasarana dan pengembangan sumber daya manusia. Namun, ditemukan kekurangan pada aspek pendanaan serta promosi, dan disarankan perlunya pelatihan pemanfaatan teknologi serta manajemen media sosial untuk mendukung promosi desa wisata.
5.	Rahman (2021).	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Koja	Teori pemberdayaan masyarakat oleh Randy R Wrihatnolo	Metode kuantitatif	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu tahap penyadaran, tahap transformasi kemampuan,

NO	PENULIS DAN TAHUN	JUDUL	TEORI	METODE	HASIL
		Doi			dan tahap peningkatan kemampuan intelektual. Bentuk pemberdayaan mencakup penyuluhan sadar wisata, pelatihan pengelolaan desa wisata, pelatihan kependudukan, dan pelatihan kewirausahaan.

Sumber : Data Diolah oleh Peneliti

Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkaji bagaimana tantangan dalam tahapan pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Jarum. Mengingat bahwa belum ada penelitian serupa yang spesifik mengangkat topik penelitian ini khususnya di Desa Wisata Jarum. Melalui observasi mendalam wawancara serta analisis data deskriptif fokus penelitian ini adalah menganalisis pemberdayaan Desa Wisata Jarum, tantangan yang dihadapi di setiap tahapan pemberdayaannya yaitu tahapan penyadaran, tahapan peningkatan kapasitas dan tahapan kemandirian.

1.6 Landasan Teori

a. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembangunan. Pemberdayaan tidak hanya dipahami sebagai pemberian bantuan dari pihak luar, melainkan sebagai proses peningkatan kapasitas, kesadaran, dan kemandirian masyarakat agar mampu mengelola potensi yang dimiliki secara berkelanjutan. Menurut Sulistyani (2004) pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai proses

untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya serta berperan dalam pembangunan. Pemberdayaan dipahami sebagai proses berkelanjutan yang menekankan penguatan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kolektif.

Pengembangan desa wisata dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan ekonomi dan sosial masyarakat lokal, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan kendala terkait kualitas sumber daya manusia dan dukungan pemerintah (Handayani et al, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak berhenti pada penetapan status desa wisata semata, tetapi memerlukan proses pendampingan yang berkelanjutan agar masyarakat mampu memahami potensi desa, meningkatkan kapasitas dalam mengelola kegiatan wisata, serta membangun kemandirian ekonomi secara bertahap.

Dengan hal ini maka pemberdayaan masyarakat menjadi elemen penting karena masyarakat lokal merupakan aktor utama dalam pengelolaan dan pengembangan potensi wisata. Keberhasilan desa wisata sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat mampu memahami peran, meningkatkan kapasitas, dan mencapai kemandirian dalam pengelolaan kegiatan wisata.

Sulistiyani (2004) memandang pemberdayaan masyarakat bukan sebagai kegiatan sesaat, melainkan sebagai suatu proses sosial yang berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan. Setiap tahapan memiliki tujuan, karakteristik, dan implikasi yang berbeda terhadap kondisi masyarakat. Tidak terlaksananya salah satu tahap dapat memengaruhi efektivitas tahapan berikutnya dan berpotensi

menyebabkan pemberdayaan berjalan tidak optimal.

1. Tahap Penayadaran

Tahap penayadaran merupakan tahap fundamental dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini, masyarakat diarahkan untuk mengenali kondisi dirinya, memahami potensi yang dimiliki, serta menyadari permasalahan yang dihadapi. Penayadaran bertujuan membangun cara pandang baru masyarakat agar tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menyadari perannya sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk terlibat dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan (Sulistiyani, 2004).

Dalam desa wisata, tahap penayadaran berkaitan dengan pemahaman masyarakat mengenai konsep desa wisata, tujuan pengembangannya, serta manfaat yang dapat diperoleh, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Penayadaran yang tidak optimal dapat menyebabkan masyarakat memandang desa wisata sekadar sebagai program pemerintah atau kegiatan seremonial, sehingga keterlibatan masyarakat bersifat pasif. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dan arah pengembangan desa wisata berdampak pada lemahnya rasa memiliki dan minimnya inisiatif masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa penayadaran bukan hanya proses penyampaian informasi, tetapi juga proses internalisasi nilai dan tujuan pembangunan desa wisata (Rahmah dan Raharjo, 2024).

2. Tahap Peningkatan kapasitas

Tahap peningkatan kapasitas merupakan lanjutan dari tahap penayadaran yang berfokus pada peningkatan kemampuan masyarakat. Pada tahap ini,

masyarakat dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan peran secara efektif dalam pengelolaan desa wisata (Sulistiyani, 2004).

Peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti pelatihan teknis, pembinaan manajemen, pendampingan kelembagaan, serta penguatan dalam bentuk kerja sama. Dalam pengembangan desa wisata. (Ariani dan Rahaju, 2023) menegaskan bahwa peningkatan kaapsitas masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan desa wisata dan mendorong munculnya inovasi lokal. Sebaliknya, tahap peningkatan kapasitas yang bersifat terbatas atau tidak berkelanjutan cenderung menghasilkan pengelolaan desa wisata yang berjalan rutin tanpa pengembangan berarti, sehingga berpotensi menimbulkan kondisi stagnan.

3. Tahap Kemandirian

Tahap kemandirian merupakan tahap akhir dalam proses pemberdayaan masyarakat, yang ditandai dengan pemberian kepercayaan, kewenangan, dan ruang bagi masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan secara mandiri. Pada tahap ini, masyarakat diharapkan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada intervensi pihak eksternal, tetapi mampu mengambil keputusan, mengelola sumber daya, serta mengembangkan inisiatif secara mandiri (Sulistiyani, 2004).

Tahap kemandirian tercermin dari kemampuan masyarakat dan kelembagaan lokal dalam merancang program, mengelola operasional, serta mengembangkan inovasi tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah. Tahap kemandirian tidak berarti menghilangkan peran pemerintah, melainkan

menggeser peran pemerintah sebagai fasilitator dan pendamping. (Rahman dan Natalia, 2025) menyatakan bahwa kemandirian masyarakat merupakan indikator penting keberhasilan pemberdayaan dalam pengembangan desa wisata. Desa wisata yang telah mencapai tahap pendayaan cenderung memiliki keberlanjutan yang lebih baik karena didukung oleh kapasitas lokal dan rasa memiliki yang kuat.

b. Tantangan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Proses pemberdayaan masyarakat tidak selamanya berjalan tanpa hambatan. Dalam konteks pemberdayaan desa wisata, berbagai tantangan kerap muncul dan menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pemberdayaan itu sendiri. Mardikanto dan Soebiato (2013) menjelaskan bahwa tantangan dalam pemberdayaan masyarakat dapat diidentifikasi dari berbagai dimensi, mulai dari kapasitas sumber daya manusia, akses terhadap modal dan teknologi, kelembagaan, hingga lingkungan kebijakan yang melingkupinya.

Tantangan pertama adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia lokal. Mardikanto dan Soebiato (2013) menyatakan bahwa kualitas SDM merupakan fondasi utama keberhasilan pemberdayaan. Ketika masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang rendah, minim pelatihan, serta kurang memiliki wawasan tentang pengelolaan potensi wisata, maka proses pemberdayaan akan menghadapi kendala yang cukup serius. Dalam konteks desa wisata, hal ini tercermin dari terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengelola atraksi wisata, melayani wisatawan, maupun mengembangkan produk-produk kreatif berbasis potensi lokal secara mandiri.

Tantangan kedua yaitu keterbatasan akses terhadap modal dan teknologi.

Mardikanto dan Soebiato (2013) menegaskan bahwa kesenjangan akses terhadap modal finansial, teknologi informasi, dan infrastruktur pendukung menjadi penghambat berkembangnya potensi lokal meski sumber daya alam yang dimiliki cukup melimpah. Bagi desa wisata yang masih dalam tahap berkembang, keterbatasan modal usaha dan minimnya pemanfaatan teknologi seperti promosi digital dapat menghambat daya saing destinasi wisata di tengah persaingan pariwisata yang semakin kompetitif.

Tantangan ketiga adalah lemahnya kelembagaan masyarakat. Menurut Mardikanto dan Soebiato (2013), kelembagaan yang tidak solid akan berdampak pada lemahnya koordinasi antar aktor, hilangnya keberlanjutan program, serta munculnya konflik internal yang menghambat gerak kolektif masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan desa wisata, kelembagaan yang dimaksud mencakup keberadaan dan kualitas kelompok sadar wisata (Pokdarwis), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maupun organisasi pengelola wisata lainnya. Apabila kelembagaan tersebut tidak berfungsi optimal, maka berbagai program pemberdayaan akan sulit diimplementasikan secara berkelanjutan.

Tantangan keempat adalah ketergantungan pada pihak luar. Mardikanto dan Soebiato (2013) mengingatkan bahwa pemberdayaan yang tidak dirancang dengan baik justru dapat melahirkan ketergantungan baru. Masyarakat yang terbiasa menerima bantuan dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, ataupun pihak swasta tanpa membangun kapasitas mandiri akan mengalami stagnasi ketika pendampingan dihentikan. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan akhir pemberdayaan, yaitu terwujudnya kemandirian masyarakat sebagaimana juga

dikemukakan oleh Sulistyani (2004) dalam tahapan pemberdayaannya.

Tantangan kelima berkaitan dengan faktor lingkungan kebijakan. Mardikanto dan Soebiato (2013) menekankan bahwa kebijakan publik yang tidak sinergis antar level pemerintahan mulai dari pusat, daerah, hingga desa dapat menjadi penghambat struktural dalam proses pemberdayaan. Tumpang tindih program, minimnya anggaran operasional, serta lemahnya koordinasi lintas sektor menjadi tantangan yang kerap dijumpai dalam pengembangan desa wisata di Indonesia.

Dengan demikian, pemahaman terhadap berbagai tantangan tersebut menjadi penting sebagai kerangka analisis untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan Desa Wisata Jarum, Kabupaten Klaten. Teori tantangan dari Mardikanto dan Soebiato (2013) ini digunakan secara komplementer bersama teori tahapan pemberdayaan dari Sulistyani (2004), sehingga penelitian ini tidak hanya mampu menggambarkan bagaimana proses pemberdayaan berlangsung, tetapi juga mampu menjelaskan mengapa proses tersebut menghadapi berbagai kendala di lapangan.

1.7 Definisi Konsep

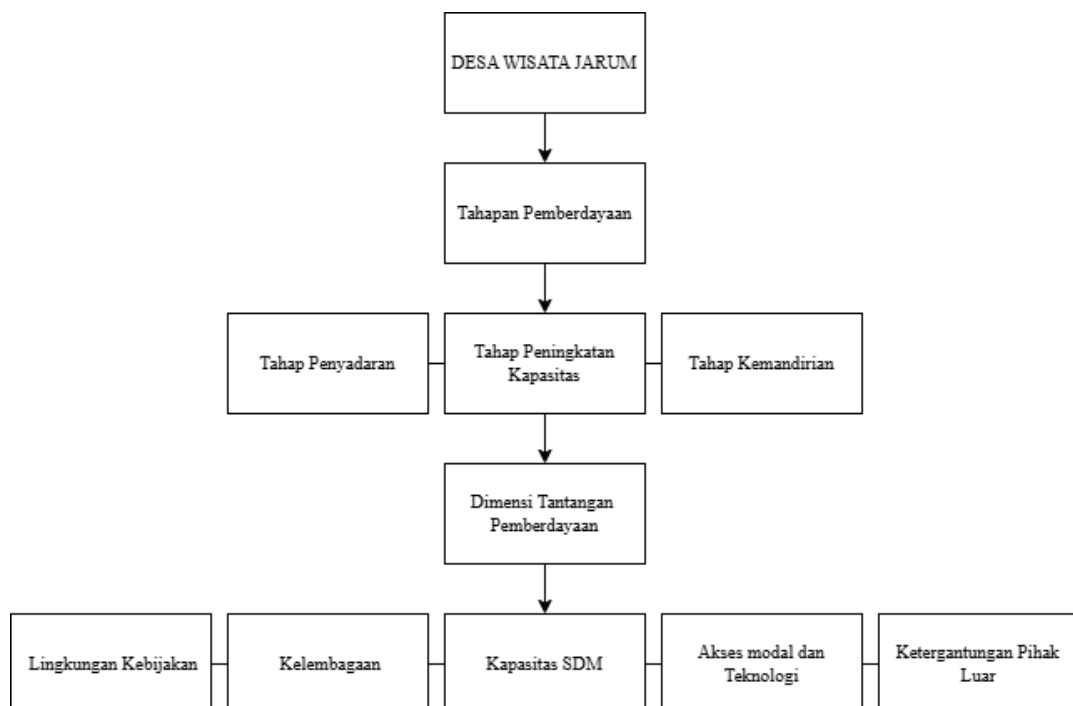
Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan, serta keterampilan masyarakat untuk mampu mengelola sumber daya yang dimiliki. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diperlukan 3

tahap yaitu tahap penyadaran, tahap transformasi kemampuan serta tahap peningkatan kemampuan

Desa wisata adalah suatu daerah pedesaan yang mempunyai potensi wisata baik berupa potensi alam maupun budaya. Desa wisata adalah desa yang memiliki daya tarik khas berupa keindahan alam, budaya, maupun aktivitas masyarakat yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Desa ini dikelola secara profesional dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat (Yoeti, 2008).

1.8 Kerangka Berpikir

Bagan 1. 1 Kerangka Berpikir



1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan untuk

memahami berdasarkan metodologi tertentu yang mengeksplorasi masalah sosial atau manusia. Peneliti membangun gambaran yang kompleks, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan mendetail dari informan, dan melaksanakan studi secara nyata (Cresswell, 2014). Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai proses investigatif yang di dalamnya peneliti secara perlahan-lahan memaknai suatu fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, mengatalogkan dan mengklasifikasikan objek penelitian (Miles & Huberman, 2016). Tujuan penelitian kualitatif adalah memahami situasi, peristiwa, peran, kelompok, atau interaksi sosial tertentu (Locke dalam Cresswell, 2014). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif peneliti berharap dapat mengeksplorasi konteks sosial secara alamiah untuk mendapatkan ide-ide permasalahan pokok secara terang untuk mengembangkan hipotesis yang ada. Penelitian kualitatif berusaha memahami, tidak hanya satu, tetapi banyak realitas. Adapun dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif peneliti dapat menganalisis lalu melaporkan fenomena dalam suatu hasil analisa dalam penelitian. Peneliti kualitatif berfokus pada proses-proses usaha memahami bagaimana sesuatu itu muncul

1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wisata Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan yaitu Desa Jarum memiliki potensi wisata berbasis budaya dan pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha serta masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata. Oleh karena itu, lokasi ini dinilai relevan dengan fokus penelitian mengenai tantangan dalam pemberdayaan Desa Wisata Jarum di

Kabupaten Klaten.

1.9.3 Subjek Penelitian

Pada penelitian ini mengambil triangulasi subjek dalam penelitian dengan pemilihan informan berdasarkan kriteria relevansi terhadap objek penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 8 narasumber dari pengurus desa wisata, pemerintah desa, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Klaten, dan pelaku usaha di Desa Wisata Jarum:

1. Uun Dyah Trisnawati, A.Md, Staf Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Klaten
2. Miyono, Pengurus Kelompok Sadar Wisata
3. Suyanto, Sekretaris Desa Jarum
4. Sunarono, Pengrajin Gamelan
5. Jembadi, Pengrajin Layah
6. Sujino, Pengrajin Batik Kayu
7. Sarwidi, Pengrajin Batik Kain
8. Daliyo, Pengrajin Kayu

1.9.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan konteks alamiah dan sesuai kondisi lapangan yang ada. Data yang digunakan umumnya berbentuk teks deskriptif, tidak bersifat numerik serta menafsirkan data, lalu mencari tema dan pola (Cresswell, 2016). Data kualitatif akan menggambarkan kondisi sesuai pada faktanya sehingga mampu membantun peneliti untuk menganalisis kondisi permasalahan. Upaya

dalam mendapatkan data kualitatif maka peneliti akan melakukan observasi langsung pada tempat penelitian dan mengutip seluruh kejadian yang dihadapi sebagai data untuk diolah.

1.9.5 Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

1. Data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung tanpa perantara apa pun. Sehingga data yang didapatkan juga secara langsung. Pengumpulan data primer dilakukan peneliti dengan proses wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2017). Metode wawancara dilakukan dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Lalu peneliti juga akan mengumpulkan data melalui observasi yaitu metode pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas dan kejadian tertentu. Sehingga peneliti akan datang langsung ke Desa Wisata Jarum di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten untuk mengamati aktivitas masyarakat guna mendapat data seras informasi yang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.
2. Data sekunder. Data sekunder merupakan data dari suatu penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Bisa dari catatan seseorang maupun buku. Data sekunder berisi catatan historis yang menjadi bukti dan disusun menjadi arsip atau data dokumenter. Peneliti mengumpulkan data sekunder dengan melihat

arsip kegiatan partisipasi masyarakat yang sudah pernah digelar di Desa Wisata Jarum.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Peneliti memilih wawancara sebagai metode penelitian guna mengumpulkan data. Wawancara merupakan suatu interaksi langsung antara peneliti dengan narasumber yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang spesifik dari narasumber. Metode wawancara adalah suatu percakapan langsung antara 2 orang atau lebih dengan syarat langsung tanpa perantara antara narasumber dan peneliti untuk mendapatkan informasi sebagai data. Pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan untuk menggali informasi secara mendalam agar dapat sampai pada inti permasalahan. Dalam wawancara peneliti harus mendengarkan secara seksama dan mencatat apa yang dikemukakan oleh narasumber. Wawancara ini sebagai penguat dari argumentasi argumentasi subjek peneliti sehingga akan menjadi valid bukan hanya menjadi asumsi belaka. Saat mencari informan penelitian, peneliti telah mempertimbangkan beberapa informan yang relevan untuk dilakukan wawancara dalam perolehan data.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti harus melihat dan menyaksikan secara langsung aktivitas yang ada di objek penelitian. Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat lebih dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2004). Teknik pengumpulan data dengan mengamati

langsung objek penelitian mampu memberikan pandangan bagi peneliti dalam melihat permasalahan sosial. Pengamatan secara langsung sekaligus sebagai penilaian untuk mengukur tingkah laku individu dalam proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati. Peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung di desa wisata Jarum guna menyaksikan secara langsung bentuk partisipasi masyarakat desa wisat Jarum dlaam pemberdayaan desa wisata.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi untuk memperkuat dan memverifikasi data hasil wawancara dan observasi, khususnya yang berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat, peran pemerintah, serta tahapan pemberdayaan menurut Sulistyani.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada model analisis interaktif Miles dan Huberman (Sugiyono, 2015) yang meliputi:

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi;
2. Penyajian data, yaitu penyusunan data dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks untuk memudahkan pemahaman;
3. Penarikan kesimpulan, yaitu proses interpretasi data untuk menjawab rumusan masalah penelitian terkait permasalahan pemberdayaan masyarakat dan peran pemerintah dalam pengembangan Desa Wisata

Jarum.

1.9.8 Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti pengelola desa wisata, Pokdarwis, aparat pemerintah desa, serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan desa wisata. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penerapan triangulasi ini dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam mengenai permasalahan pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Jarum. Dengan membandingkan berbagai sumber dan teknik pengumpulan data, peneliti dapat memastikan bahwa temuan terkait tahapan pemberdayaan benar-benar mencerminkan kondisi empiris di lapangan dan bukan sekadar pandangan satu pihak.